

Advocacy Korban Bencana Pasca Banjir Bandang: Upaya membangun kembali kekuatan komunitas dengan mitigasi bencana Alam

Andi Sukmawati Assaad¹, Helmi Kamal², Adriana Mustafa³

Kata Kunci:

Advocacy;
Participatory Action Research;
Bencana Banjir.

Keywords :

Advocacy;
Participatory Action Research;
Flood Disaster.

Correspondensi Author

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama
Islam Negeri Palopo
Email:
hj.a.sukma@iainpalopo.ac.id

Article History

Received: 22-02-2024;
Reviewed: 26-02-2024;
Accepted: 21-03-2024;
Available Online: 18-04-2024;
Published: 24-04-2024;

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kembali semangat warga Desa Radda setelah bencana banjir bandang, dengan fokus pada pengurangan risiko bencana di masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), di mana tim pengabdian kepada masyarakat mengamati dan berinteraksi langsung dengan warga untuk memahami kebutuhan mereka dan mengidentifikasi solusi yang dapat diimplementasikan bersama. Sebagai bagian dari penelitian ini, forum diskusi dibentuk melibatkan pemuka masyarakat dan aparat pemerintah setempat. Tujuannya adalah untuk mendengarkan aspirasi warga dan merumuskan strategi untuk pemulihan pasca-bencana. Melalui pendekatan PAR, tim peneliti mengumpulkan data dan mengembangkan langkah-langkah strategis untuk memulihkan semangat komunitas, termasuk pemetaan, pengorganisasian masyarakat, dan aksi perubahan. Hasil dari proses ini mencakup sejumlah langkah praktis untuk memperkuat komunitas dan meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Di antaranya, pemetaan kebutuhan warga, penyusunan agenda riset, pengorganisasian aksi komunitas, serta pelatihan dan edukasi mitigasi bencana. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat desa Radda mampu membangun kembali kekuatan komunitas dan mengurangi risiko bencana di masa depan. Kesimpulannya, pendekatan PAR terbukti efektif dalam merangkul dan memberdayakan komunitas untuk aksi mitigasi dan penanganan bencana. Masyarakat Desa Radda kini lebih siap dan teredukasi dalam menghadapi bencana di masa depan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model untuk pengurangan risiko bencana di komunitas lainnya.

Abstract. This study aims to rebuild the spirit of the residents in Radda Village following a flash flood disaster, with a focus on reducing future disaster risks. The approach used is Participatory Action Research (PAR), where the community service team observes and interacts directly with the residents to understand their needs and identify solutions that can be collaboratively implemented. As part of this study, a discussion forum

was formed, involving community leaders and local government officials. The goal was to hear the residents' aspirations and formulate strategies for post-disaster recovery. Through the PAR approach, the research team collected data and developed strategic steps to rebuild the community's spirit, including mapping, community organizing, and action-based initiatives. The results of this process include several practical steps to strengthen the community and increase disaster readiness. These include mapping residents' needs, establishing a research agenda, organizing community action, as well as disaster mitigation training and education. With these measures, the residents of Radda Village are able to rebuild their community's strength and reduce future disaster risks. In conclusion, the PAR approach has proven effective in engaging and empowering the community for disaster mitigation and management. The residents of Radda Village are now better prepared and educated to face future disasters, and the findings from this study are expected to serve as a model for disaster risk reduction in other communities.

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



PENDAHULUAN

Berdasarkan data Sabtu Juli 2020 telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara terdapat 37 orang meninggal dunia, 40 orang hilang, 58 luka-luka dan 14.483 jiwa mengungsi di 76 titik di 3 Kecamatan, menurut warga kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba terdapat beberapa daerah yang berdampak parah, seperti daerah Radda, Bone Tua dan Baebunta, bahkan ada beberapa kampung yang hilang karena tertimbun material pasir dan lumpur dan yang terparah ada di daerah Radda (Jamin & Risfaisal, 2021). Berdasarkan laporan BPBD setempat sebanyak 156 KK (655 jiwa) mengungsi, dan 4.202 KK (15994 jiwa) terdampak kerugian material, tercatat 4.930 unit rumah terendam, 10 unit rumah hanyut, 213 rumah tertimbun pasir bercampur lumpur, 1 kantor Koramil 1403-11 terendam air dan lumpur ketinggian 1 meter, 82 tempat usaha mikro, 13 tempat ibadah, 9 Sekolah, 8 Kantor pemerintahan, 3 fasilitas kesehatan, 2 fasilitas umum, dan 1 pasar, kerusakan infrastruktur meliputi jalan sepanjang 12,8 km, 9 unit jembatan, 100 meter pipa air bersih dan 2 unit bendungan irigasi,

kerusakan lahan produktif mencakup 219 ha lahan pertanian, dan 241 hektar lahan sawah (Antara & Eko Ari Wibowo, 2020; Raditya Jati, 2020b, 2020a).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih mengumpulkan data-data untuk menganalisis pemicu banjir bandang di Masamba, Luwu Utara Sulawesi Selatan. Menurut kepala pusat data, informasi dan komunikasi kebencanaan BNPB (Raditya Djati, 2020). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara menyebutkan salah satu pemicu banjir adalah hujan dengan intensitas tinggi selama dua hari terakhir, Debit air hujan mengakibatkan sungai Masamba Rongkong dan sungai Radda meluap. Banjir bandang Masamba terjadi akibat degradasi lingkungan (Mustakim Arif, Wawancara, 2022) atau bencana ekologis, perubahan iklim lantaran pemanasan global. Secara topografis, Luwu Utara merupakan perpaduan geologis wilayah dataran tinggi verbeek dengan dataran-dataran rendah yang memiliki tanah subur, karakteristik tanah subur adalah tanah gembur yang seharusnya direhat oleh tumbuhan atau pepohonan namun hutan dibuka untuk perkebunan,

pertanian, dan industri ekstraktif seperti tambang akan merusak daya dukung ekologis kawasan tanah yang subur (Darmadi, 2021; Efektivitas et al., 2022).

Dalam menghadapi kondisi yang genting, khususnya di daerah Radda dan Meli yang rawan terhadap bencana banjir, perlu dilakukan identifikasi terhadap akar masalah yang mendasari potensi terulangnya kejadian tersebut (Ramadana, 2023). Salah satu faktor utama yang teridentifikasi adalah ekspansi lahan perkebunan, pertanian, dan industri tambang. Selain itu, penting bagi Pemerintah Luwu Utara untuk mempertimbangkan kembali tata ruang wilayah guna memulihkan degradasi lingkungan dan merevisi perencanaan pembangunan yang mengutamakan perbaikan dan keberlanjutan lingkungan serta mitigasi bencana. Masyarakat yang berada di wilayah rentan seharusnya memiliki kesiapan adaptasi secara sosial dan rencana darurat yang dapat membantu meminimalisir dampak saat terjadi bencana. Fokus pengabdian diarahkan pada advokasi, pembangunan kekuatan komunitas, dan pengorganisasiannya oleh elemen masyarakat setempat untuk menemukan akar masalah utama dan faktor penyebab, sehingga masyarakat dapat terhindar dari risiko banjir bandang di masa mendatang. Desa Radda dan 4 Dusunnya salah satu daerah terparah banjir bandang Masamba yang menelan banyak korban jiwa dan kerusakan harta benda yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir walaupun banjir di kota Masamba dan daerah lain namun tempat kami tidak kena banjir menurut salah seorang penduduk Radda namun tidak dipungkiri di daerah Radda banyak perkebunan sawit yang menjadikan sebagian penduduknya sejahtera hidupnya (Burhanuddin, Wawancara, 2022).

Menurut data info sawit Masamba, Tanggal 8 Oktober 2018 Bupati Luwu meletakkan batu pertama pembangunan Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) PT Kasmar Matano Persada dibangun di desa Radda Kecamatan Baebunta dan merupakan pabrik ketiga yang dibangun sebelumnya telah beroperasi PKS milik PT Jas Mulia di Sukamaju, PKS Surya Sawit Sejahtera di Tanalili, saat ini ada 18 ribu kebun kelapa sawit di Luwu Utara, 8 ribu hektar yang sudah produksi, 6 ribu hektar tanaman muda, dan selebihnya masih berumur 1 hingga 2

tahun. Sehingga menambah jumlah pabrik di Luwu Utara (Admin, 2018).

Luwu Utara banjir sudah diprediksi sejak 2019 pembukaan lahan kelapa sawit memperparah keadaan oleh praktik penebangan hutan dan perluasan lahan-lahan perkebunan sawit (Pegiat Akademisi Universitas Hasanuddin, Wawancara, 2022). Hasil analisis sementara Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dua faktor penyebab banjir bandang di Luwu Utara yakni alam dan manusia. Faktor alam adanya curah hujan yang intens ditambah kemiringan lereng dibagian Baliase sangat curam. Adapun faktor manusia, KLHK memantau adanya pembukaan lahan didaerah hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif perkebunan kelapa sawit (Pegiat Akademisi Universitas Hasanuddin, Wawancara, 2022).

Dengan demikian inti masalah banjir bandang di Masamba utamanya daerah Radda dan Meli yang terparah adalah adanya kerusakan dan eksploitasi hutan disebabkan oleh pengalihan menjadi perkebunan sawit dan disinyalir adanya tambang yang dilakukan oleh sekelompok orang atau investor (Ali & Besse Muqita Mentari Rijal, 2022). Maka sebagai peneliti PAR akan melakukan advokasi, pemecahan masalah bersama masyarakat setempat atas adanya yang melakukan pengrusakan dan eksploitasi hutan sehingga terjadi banjir bandang.

Lokasi Radda dan Meli saat ini pasca banjir bandang kurang lebih 3 bulan masih ada dipengungsian dan masih berlangsung dapur umum dan relawan dari Komunitas Cakra dari Jakarta memberikan penanganan trauma healing kepada anak-anak khususnya. Relawan Jamak Tablik membangun masjid darurat dan masih ada ditempat pengungsian, sesekali para donatur dari berbagai elemen datang membawa bantuan. Peneliti bersama masyarakat melakukan mitigasi diwakili pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pengacara, LSM mencari informasi/data adanya relasi kuasa yang terlibat dalam pengrusakan atau eksploitasi hutan dengan melakukan pemetaan daerah Radda dan Meli dengan alur masalah dari berbagai aspek yakni kebijakan, adanya sistem yang bekerja, adanya pihak-pihak perusahaan swasta atau investor yang terlibat.

Melakukan proses-proses advokasi secara jangka pendek dan jangka panjang dengan membela hak-hak masyarakat misalnya ganti rugi pada yang melakukan pengrusakan/eksploitasi hutan baik dari pihak pemerintah ataupun perusahaan swasta, analisis-analisis kerawanan banjir dengan memetakan, adanya siaga bencana banjir bandang, hutan dikembalikan fungsinya sebagai perekat, pemerintah kabupaten melakukan perbaikan terkait perencanaan pembangunan daya dukung lingkungan, tata kelola lingkungan, mendorong pihak pembuat undang-undang/dewan membuat aturan, dan sanksi bagi yang melakukan pengrusakan hutan yang mengakibatkan banjir bandang sehingga mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dan lainnya.

Peneliti akan menginisiasi kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk lembaga akademis, pemerintah Desa Radda (termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa), anggota dewan, LSM, dan pihak lainnya. Kolaborasi ini akan melibatkan pembentukan tim yang terdiri dari berbagai stakeholder, termasuk perwakilan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, pengacara, dan LSM. Tim ini akan melakukan mitigasi dengan berbagai cara yang dipimpin oleh pemerintah desa, dengan mempertimbangkan perspektif yang beragam dari para anggota tim. Salah satu tugas utama tim adalah membuat pemetaan wilayah yang komprehensif, serta mengumpulkan informasi dan data terkait dengan relasi kuasa yang terlibat dalam aktivitas pengrusakan atau eksploitasi hutan di wilayah Radda dan Meli. Pemetaan tersebut akan mencakup berbagai aspek, seperti analisis kebijakan yang relevan, identifikasi sistem yang terlibat, serta identifikasi peran perusahaan swasta atau investor yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap secara lebih ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengrusakan atau eksploitasi hutan di wilayah tersebut.

METODE

Pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan di Desa Radda kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara pasca banjir bandang adalah Participatory Action Research (PAR) yakni suatu

penelitian/pengabdian yang melibatkan stakeholder yang berkolerasi untuk mengamati aksi yang sementara terjadi atau berlangsung demi menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Penelitian dimulai dengan pemetaan awal wilayah Desa Radda untuk memahami konteks lokasi penelitian, diikuti dengan pendekatan kemanusiaan dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Bersama stakeholder lokal, agenda riset ditentukan dan pemetaan partisipatif dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah rentan terhadap banjir. Melalui metode PRA, masalah bencana dirumuskan, strategi gerakan disusun, dan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam mengelola lahan dan membentuk komunitas tanggap bencana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengimplementasikan tindakan mitigasi bencana dengan melibatkan masyarakat secara aktif, yang kemudian direfleksikan untuk mengevaluasi hasil dan pembelajaran yang diperoleh dari proses riset aksi tersebut.

Wilayah yang dijadikan obyek penelitian/pengabdian adalah di Desa Radda dengan 7 Dusun yang berada di Kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara. Desa Radda dan 7 Dusunnya yang merupakan salah satu wilayah yang terparah banjir bandang.

Dalam pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) yang merupakan pendekatan partisipatif untuk mengevaluasi kondisi pedesaan. Tujuan utama PRA adalah memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan dan menganalisis kondisi daerah mereka sendiri agar dapat merencanakan dan bertindak mandiri (Hudayana et al., 2019). Teknik ini melibatkan beberapa aktivitas, termasuk wawancara mendalam, pemetaan wilayah, Focus Group Discussion (FGD), penelusuran wilayah, timeline alur sejarah, dan kalender musim, yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kondisi dan faktor-faktor yang memengaruhi risiko bencana banjir di Desa Radda.

Validasi data menggunakan teknik triangulasi yang melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dalam penelitian. Triangulasi dilakukan dengan campuran beberapa teknik, seperti melibatkan beragam kelompok

multidisiplin, baik internal maupun eksternal, serta kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi kualitatif yang valid (Bans-Akutey & Tiimub, 2021). Dengan pendekatan ini, keabsahan data dapat diperkuat.

Teknik analisis data yang digunakan mencakup beberapa metode. Pertama, menggunakan Analisis Diagram Venn (Bartel et al., 2021; Utrilla-Vázquez et al., 2020) untuk memvisualisasikan hubungan antara masyarakat dan lembaga di Desa Radda, dengan tujuan agar masyarakat dapat mengidentifikasi lembaga yang ada dan peran pentingnya. Kedua, Analisis Sejarah Timeline atau penelusuran sejarah digunakan untuk memahami peristiwa penting dan perubahan dalam jangka waktu tertentu (Wallerstein et al., 2019), seperti peristiwa banjir bandang, termasuk penyebab, dampak, dan kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, Analisis Pohon Masalah dan Pohon Harapan digunakan untuk mengidentifikasi inti permasalahan, penyebab, dan dampaknya, serta menyusun harapan bersama dengan masyarakat yang terlibat, dengan menggunakan data hasil PRA. Terakhir, melibatkan Pihak yang Terlibat atau stakeholder yang mendukung program dan perubahan di masyarakat, termasuk individu, kelompok, atau lembaga yang berperan aktif dalam proses pengorganisasian. Dengan menggunakan beragam teknik ini, analisis data dapat dilakukan secara komprehensif untuk mendukung perencanaan dan implementasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi/Komunitas Par

Desa Radda merupakan salah satu dari 15 desa yang ada di kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara dan memiliki 7 dusun terdiri dari dusun Rea kepala dusun bernama Mandar, dusun Bone kepala dusun bernama Sialin, dusun Touba kepala dusun bernama Sulkifli, dusun Petambua kepala dusun bernama Bakri, dusun Radda kadus PLT bernama Burhanuddin, dusun Lawadi PLT kepala dusun bernama Nurul Kharisma, dusun Kelapa Gading kepala dusun bernama Asri Saleh (Burhanuddin, Wawancara, 31 Mei 2022).

Pada dusun Petambua, dusun Bone dan dusun Radda terparah dan rentan menerima banjir hingga saat ini masyarakat masih sangat

khawatir jika hujan deras datang, ini disebabkan sungai radda pasca banjir bandang banyak mengandung material pasir sehingga hujan sedikit saja air sungai naik.(wawancara masyarakat). Jumlah penduduk yang meninggal akibat bajir bandang sebanyak 31 orang, jumlah penduduk saat ini kurang lebih 5153 jiwa (Burhanuddin, Wawancara, 31 mei 2022).

Kerugian yang dialami penduduk desa Radda antara lain; infra struktur hancur, lahan persawahan dan perkebunan tertimbun lumpur, tanaman kelapa sawit mati kurang lebih 10 Ha, kantor desa sudah tidak ada, kantor sekarang rumah salah satu penduduk yang disewa keluarga yang tinggal dirumah tersbut meninggal semua ada yang ditemukan mayat dan yang tidak.

Masyarakat desa Radda sebagian ada yang masih menempati rumah yang terkena banjir sudah diperbaiki dan sebagian lagi didistribusikan ke rumah ganti yang dibangun oleh pemerintah tergantung besarnya tingkat kerugian rumah tempat tinggal masyarakat sementara lahan yang hilang karena banjir, lahan yang tidak bisa lagi ditanami karena tanah mengandung banyak air belum diberi ganti rugi. Pendistribusian rumah HUNTAP (rusak berat) oleh pemerintah sudah tuntas atau selesai dengan rincian sebagai berikut : dusun Petambua, dusun Radda, dusun Bone, dusun Rea, dusun Touba sebanyak 243 unit, geotek/tanggul 23 unit, insitu/dibangun di atas lahan sendiri 34 unit (Burhanuddin, Wawancara, 4 Juni 2022).

Perencanaan Participatori Action

Tim Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menjalankan serangkaian langkah-langkah perencanaan yang terstruktur untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Radda. Langkah pertama adalah melakukan pemetaan awal untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan dinamika komunitas, termasuk interaksi sosial dan permasalahan yang dihadapi. Dengan memahami konteks ini, tim PKM dapat masuk ke dalam komunitas dan berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk membangun hubungan kemanusiaan yang saling mendukung.

Selanjutnya, tim PKM bekerja sama

dengan masyarakat dalam menentukan agenda riset yang akan dilaksanakan, dengan menggunakan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk merinci persoalan yang perlu dipecahkan. Langkah ini juga melibatkan pembentukan kelompok komunitas, seperti kelompok sigap dan peduli bencana, sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Setelah agenda riset ditentukan, tim PKM memfasilitasi proses pemetaan partisipatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi geografis, sosial, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui pemetaan ini, tim dapat mengidentifikasi masalah secara lebih spesifik menggunakan berbagai teknik PRA, seperti Transekt, Diagram Ven, dan kalender musim.

Setelah masalah-masalah kemanusiaan teridentifikasi, tim PKM dan komunitas bekerja sama untuk merumuskan strategi gerakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah tersebut. Strategi ini melibatkan penentuan langkah-langkah sistematis, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan merumuskan potensi keberhasilan dan kegagalan program yang direncanakan. Langkah-langkah selanjutnya termasuk pengorganisasian masyarakat, pelaksanaan aksi perubahan, refleksi atas proses dan hasil yang telah dilakukan, serta upaya untuk meluaskan skala gerakan dan dukungan di masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi masalah sosial dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan di Desa Radda.

Identifikasi Masalah

Desa Radda dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Pertama, masih ada rumah-rumah masyarakat yang belum teraliri listrik dan air bersih, sebuah permasalahan yang sudah diakui oleh pemerintah dan sedang dalam tahap penyelesaian. Kedua, lahan perkebunan dan sawah masyarakat mengalami penurunan produktivitas akibat banjir bandang, membutuhkan pemulihan dengan pemberian bibit sawit karena sebagian besar tanaman mati terbawa air saat bencana tersebut. Ketiga, sungai Radda terhambat oleh material pasir yang menumpuk pasca banjir bandang.

Keempat, banyak warga kehilangan mata pencarian mereka sebagai petani setelah terjadi bencana tersebut. Kelima, masih terdapat keterbatasan dalam sistem peringatan dini untuk mengantisipasi bencana di Desa Radda. Terakhir, ada kebutuhan akan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa yang menjadi korban banjir bandang, sebagai langkah untuk membantu mereka dalam menjalani pendidikan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan Desa Radda.

Kronologis

Membawa izin penelitian/pengabdian kepada kepala Desa Radda dan menyampaikan tujuan pengabdian kepada masyarakat pasca banjir bandang. Melakukan kunjungan kedua untuk mencari informasi/data terkait kondisi desa Radda pasca banjir bandang. Melakukan pertemuan dengan mengundang masyarakat yang diwakili tokoh pemerintah 7 kepala Dusun, tokoh agama/adat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan. Tujuan kegiatan ini mendengarkan secara langsung keluhan dan masalah masyarakat pasca banjir bandang. Melakukan pertemuan kepada ibu Bupati dan menyampaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus menyampaikan keluhan dan masalah masyarakat desa Radda. Ibu Bupati merespon positif kegiatan dan menyampaikan dukungan pemerintah terhadap masyarakat Radda salah satunya sudah melakukan ganti rugi atas rumah/tinggal masyarakat 20%, 50%, 100% tergantung tingkat kerusakannya. Melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Baznas. Mahasiswa membawa surat permohonan kesediaan sebagai narasumber di kantor dinas PU dan dinas pertanian. Melakukan FGD dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah-masalah masyarakat desa Radda pasca banjir bandang antara lain Kepala Dinas PU Luwu Utara, PLT Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara, Kepala BPBD Luwu Utara, Pihak Kampus IAIN Palopo.

Aktor dan Relasi Antar Aktor

Aktor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di desa Radda

Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara saling berinteraksi dan saling memengaruhi serta memiliki karakteristik dan melibatkan berbagai macam kepentingan untuk didiskusikan dan dikompromikan (Anderson, 2003). Diantara aktor-aktor tersebut dalam mengambil keputusan, terdapat kekuatan-kekuatan yang selalu mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, antara lain dinamika individu di dalam organisasi, dinamika kelompok orang-orang di dalam organisasi, serta dinamika lingkungan organisasi.

Tim PAR ini akan menganalisis aktor dan relasi antar aktor dengan menggunakan pendekatan aktor dan hubungan antar aktor dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Peran aktor atau stakeholder dalam manajemen bencana banjir yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah/ Bupati, BNPB dan lembaga swasta dan internasional telah diatur dalam peraturan pemerintah. Instansi/institusi mempunyai tugas, fungsi, dan perannya masing-masing sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Namun dapat dilihat dari tugas, fungsi dan perannya, bahwa BNPB/BPBD mempunyai peran yang secara langsung berwenang dalam penanganan bencana, khususnya pada mitigasi bencana banjir. Hal ini didasarkan pada pembentukan lembaga BNPB/BPBD sebagai pusat dalam penanggulangan bencana nasional dan daerah.

Dalam kerangka analisis ini, aktor pengambil keputusan adalah Bupati Luwu Utara dan pihak-pihak penanggulangan pasca bencana banjir bandang yang antara lain, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, kepala desa, kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh wanita, sebagai pihak yang memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Burhanuddin, Wawancara, 14 Juni 2022).

Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam penyelesaian masalah bencana, khususnya pada hal mitigasi bencana banjir. Peran dan tanggung jawab pemerintah telah diatur pada UU No. 24 Tahun 2007, bahwa penyelenggaraan tanggung penanggulangan bencana diserahkan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BNPB (Badan

Nasional Penanggulangan Bencana), namun pada pasal 28, 29, dan 30 UU No. 24 Tahun 2007 merumuskan lembaga usaha dan organisasi internasional dalam penanggulangan bencana baik secara sendiri maupun bersama-sama. Peran pemerintah pusat tersebar di berbagai Kementerian serta lembaga non kementerian, masing-masing mempunyai fungsi dan peran dalam hal mitigasi bencana banjir. Peran serta semua lembaga pemerintah dalam mitigasi bencana banjir menyebar di hampir seluruh instansi/institusi, baik kementerian maupun lembaga non kementerian. Hal ini menunjukkan masing-masing lembaga mempunyai andil yang berbeda-beda dalam mitigasi bencana banjir. Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir, setiap lembaga saling berkoordinasi antara satu sama lain. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai peran dalam hal mitigasi bencana banjir, namun tugas dan fungsi yang dilakukan searah dengan pemerintah pusat. Perbedaan penanganan mitigasi bencana banjir antara pemerintah pusat daerah ialah pada tata letak wilayah, pemerintah pusat melaksanakan mitigasi secara menyeluruh di wilayah Indonesia, sedangkan pemerintah daerah pada daerah otonomnya sendiri.

Fungsi dan peran pemerintah daerah sangat jelas dalam mitigasi bencana banjir, pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan bencana meliputi, mitigasi, kegiatan pra bencana dan pasca bencana. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkoordinasi pada semua instansi terkait yang mempunyai fungsi dalam mitigasi bencana banjir. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi terhadap penyusunan rencana penanggulangan bencana banjir dengan BPBD, karena lembaga atau institusi BPBD mempunyai kewenangan lebih terhadap mitigasi bencana banjir. Pada dasarnya pemerintah daerah dan BPBD mempunyai kedudukan yang sama dalam penanganan mitigasi bencana banjir (Nurdin, Wawancara, 2022), BPBD sendiri merupakan bentukan dari BNPB yang dimana lembaga ini memiliki kewenangan yang besar terhadap penanggulangan bencana yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas dan fungsi yang langsung dalam kewenangan penanganan

mitigasi bencana banjir. Secara khusus BNPB dan BPBD menjadi pusat.

Aksi/Advokasi

Pelaksanaan Program

Mengundang BPBD dan BASARNAS melakukan FGD dan seminar penanganan tanggap darurat, menciptakan sistem peringatan dini. Mengundang dinas PU melakukan FGD dan seminar normalisasi sungai Radda. Mengundang dinas pertanian melakukan FGD dan seminar penataan lahan. Mengorganisir berdirinya lembaga komunitas tanggap bencana. Mengundang pihak Pimpinan IAIN Palopo terkait UKT mahasiswa terkena banjir bandang di desa Radda.

Melakukan koordinasi dengan kepala pemerintahan desa Radda. Melakukan koordinasi dengan kepala pemerintahan Kabupaten Luwu Utara (ibu Bupati). Melakukan koordinasi dengan Kepala BPBD, BASARNAS Luwu Utara. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Luwu Utara. Melakukan koordinasi dengan dinas pertanian Luwu Utara. Setelah melakukan koordinasi kepada pihak-pihak berkepentingan mengunjungi dan mengundang kesediaannya untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama komunitas masyarakat desa Radda dihadiri oleh kepala desa dan jajarannya, 7 kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda.

Hasil Program

Tujuan diadakan FGD adalah duduk bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan mewakili pemerintah kabupaten Luwu Utara bersama masyarakat yang terkena banjir bandang agar masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa Radda dapat didengar, diketahui, dan dicarikan solusi strategis dengan penanganan yang tepat guna walaupun sebagian besar dari mereka adalah juga terkena dampak banjir bandang termasuk saya dan ibu bupati (Ir. Rusli, Wawancara, 1 Juli 2022).

Bentuk kepedulian dan memberikan penanganan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pasca banjir bandang dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan yakni BPBD untuk memberikan solusi terkait peringatan dini dan

tanggap darurat, Dinas PU untuk penanganan sungai yang diisi materil pasir, Dinas Pertanian untuk memberikan solusi terkait lahan kebun mata pencarian masyarakat yang terkena banjir bandang dan pihak perguruan tinggi yang diwakili IAIN Palopo terkait mahasiswa yang terkena banjir bandang.

Setelah diadakan FGD, maka adapun hasil FGD dari Dinas PU, dinas Pertanian, dan BPBD yakni masalah dan solusi penanganan dari Dinas PU yang telah, sedang dan akan dilaksanakan (Ir. Rusli, Wawancara, 1 Juli 2022) antara lain: Kembali kronologis peristiwa banjir bandang tgl 13 Juli 2020, ada 3 sungai yaitu sungai Radda, sungai rongkong, sungai masamba. Menelan korban jiwa 8 orang yang hilang tidak ditemukan, 39 meninggal ditemukan, 106 orang korban jiwa pada saat itu. Korban non jiwa kerusakan infra struktur dan sarana prasarana untuk rumah 1005 unit rumah rusak berat, 516 unit rumah rusak sedang, rusak ringan 2242 unit rumah termasuk rumah saya rusak ringan dan mendapat bantuan 10 jt (Ir. Rusli, Wawancara, 1 Juli 2022), jalan yg rusak 51,75 km, irigasi 3, drenaise 43 km lebih, sambungan air bersih kerumah-rumah penduduk 1200 sambungan air bersih, tempat usaha, sarana pendidikan. Lahan pertanian padi 1966 ha di desa radda masih sementara optimalisasi sawah dan sudah mulai menanam, sudah dihilangkan semua material kayu-kayu dan lainnya (Ir. Rusli, Wawancara, 1 Juli 2022).

Apa yg telah kita lakukan penanganan pertama langkah darurat yakni jalan nasional yang ada di desa Radda sudah diperbaiki, 3 jembatan sudah diperbaiki, kita estimasi anggaran bayangkan kita butuh anggaran 823 lebih miliar untuk menyelesaikan perbaikan sementara APBD kita misalnya hanya 1 miliar tidak mungkin kita selesaikan secara keseluruhan dan dalam waktu singkat maka mesti perbaikan dilakukan dengan bertahap.

Masalah normalisasi sungai ketika terjadi banjir bandang ditiga sungai sedimen pasir normalnya 28 jt m kubik setelah terjadi banjir bandang ada 220jt m kubik sedimen pasir, rumput, kayu ada peningkatan dasar sungai 1-5 meter. Sebelum 7jt m kubik setelah banjir bandang 55 jt m kubik, 1000 eskapator diturunkan selama setahun untuk mengeruk sungai tidak akan bisa trangkit semua maka pengembalian sungai seperti dulu itu tidak mungkin. Apa boleh buat sehingga

penanganan harus pengerukan secara terbatas, namun yang terpenting pengamanannya dulu yakni menanggul pinggir sungai, pemberian batu gajah, normalisasi penanganan dan masih tetap dilakukan. BPBD ada dana rehabilitasi dan rekonstruksi dreinase tahun ini dilokasinya di desa Radda.

Pendekatan regulasi karena ada aturan yang membatasi misalnya sungai itu kewenangan pemerintah pusat tidak bisa kita lakukan perbaikan karena bukan kewenangan pemerintah daerah tanpa izin dari pemerintah pusat, harus dipahami bahwa ada kewenangan pemerintah pusat, Kewenangan Provinsi dan kewenangan pemerintah daerah tetapi masyarakat selalu menganggap kalau ada kerusakan dilimpahkan ke kita (pemerintah daerah), kami hanya menyampaikan ada jalan rusak tapi sementara ini yang diteriaki kamin di daerah padahal kewenangan provinsi.

Masalah teknis, saya kira tidak ada masalah sudah dilakukan analisa dan yang ketiga masalah anggaran pada masa pandemic hampir semua anggaran dibawa ke anggaran ke covid pandemic termasuk dana Desa sehingga ketika terjadi bencana banyak kita butuhkan tapi dana uang tidak ada makanya kita lakukan secara bertahap saja sedikit demi sedikit.

Masalah selanjutnya adalah permasalahan social kita sudah mau berbuat, rancangan sudah ada, ada anggaran, terbentur lagi dengan masalah social. Sudah dilakukan sosialisasi mau dilakukan tanggul dipinggir bibir sungai masyarakat tidak mau masyarakat minta ganti rugi sementara tidak ada ganti rugi dalam bencana tapi yang adalah bantuan korban bencana karena tidak ada aturan sehingga terbelengkalai. Ada juga masyarakat tidak mau diambil tanah untuk penimbunan jalan katanya tanah nanti habis dan rendah tempatnya, ada juga diminta tanahnya untuk aliran air masyarakat tidak mau padahal untuk kepentingan bersama dan diberikan ganti rugi. Begitu susah kita memulihkan secara keseluruhan perlu bertahap pasca banjir bandang. Ada akan dibangun 3 bendungan. Listrik untuk huntap, dreinase sementara masyarakat harus sabar. Hunian tetap sementara dikerja dan sebagian. Ada beberapa titik sungai mencari jalan sendiri.

Setelah diadakan FGD Pemerintah daerah lebih tahu masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat dengan jelas sebagaimana

yang disampaikan oleh pak Acos bahwa terdapat titik-titik sungai mencari jalan sendiri di desa Radda (Acos Santo, Wawancara 1 Juli 2022). Menurut Kepala Desa Radda masih ada 4 warga yang tidak terdata dalam usulan memperoleh huntap padahal rumahnya hilang mungkin karena belakangan terdaftar dan dikhawatirkan tidak terealisasi dan bisa terjadi kesenjangan. usulan pak acos santon termasuk usulan terbaik karena kami selaku pemerintah desa tidak terjangkau (Burhanuddin, Wawancara, 1 Juli 2022).

Dengan FGD yang diberikan oleh pemerintah beserta stakeholder terkait, setidaknya memberikan gambaran konkrit terhadap pemerintah mengenai persoalan masyarakat Radda dan sekitarnya, untuk kemudian berdasarkan masukan informasi di masyarakat akan memberikan acuan bagi program kerja pemerintah kabupaten Luwu Utara, terhadap upaya-upaya apa saja yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat, agar mereka dapat kembali beraktifitas dan bangkit kembali dari belenggu keterpurukan yang diakibatkan oleh bencana banjir bandang beberapa waktu yang lalu.

Hambatan Program

Minimnya biaya sehingga peneliti hanya mengambil satu lokasi di desa Radda saja dan desa Meli tidak. Warga masyarakat kurang yakin kegiatan pengabdian yang kami lakukan dapat membantu keluar dari masalah- masalah yang dihadapinya. Warga masyarakat berharap ada bantuan secara materi. Warga masyarakat curiga dimanfaatkan oleh sekelompok orang, organisasi untuk meraih keuntungan. Warga masyarakat berharap masalah-masalah yang dihadapi pasca banjir bandang sampai kepusat. Penyesuaian waktu dengan pihak-pihak akan diundang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, upaya advokasi dilakukan dengan memperkuat komunitas masyarakat Desa Radda dalam mitigasi pasca bencana banjir bandang, sebagai langkah pengurangan risiko dan penyuluhan kepada masyarakat dalam penanganan bencana tersebut. Mitigasi bencana banjir memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, lembaga swasta,

dan internasional. Namun, dalam konteks tugas, fungsi utama mitigasi bencana banjir sebagian besar diemban oleh BNPB dan/atau BPBD, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 mengenai peran setiap stakeholder.

Kedua, upaya mengurangi risiko bencana di masa mendatang dilakukan melalui berbagai tindakan mitigasi, seperti pembangunan jalan, jembatan, hunian tetap dengan fasilitas air bersih (PAM) dan listrik, normalisasi sungai secara bertahap, normalisasi lahan pertanian dan perkebunan, serta implementasi sistem peringatan dini yang diorganisir oleh elemen masyarakat setempat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meminimalkan dampak banjir bandang di masa mendatang.

Terakhir, mencari akar masalah utama dari banjir bandang menunjukkan adanya faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi dan peralihan fungsi hutan, yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama ini, langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat dirancang untuk mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.

Saran dari pengabdian ini berupa arahan melakukan studi longitudinal guna mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diimplementasikan. Hal ini dapat meliputi analisis tingkat keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana serta dampak sosial-ekonomi dari program-program tersebut.

Kemudian, mengingat peran penting berbagai pihak dalam mitigasi bencana, diperlukan penelitian mengenai efektivitas koordinasi dan kerjasama antar-stakeholder, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB/BPBD, serta lembaga swasta dan internasional. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam hal kolaborasi.

Mengingat bahwa curah hujan yang tinggi dan peralihan fungsi hutan merupakan faktor penyebab utama banjir bandang, diperlukan penelitian mendalam mengenai pengaruh perubahan iklim dan deforestasi terhadap risiko bencana. Studi ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penelitian tentang

pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini yang efektif, termasuk penggunaan teknologi terbaru, sangat dianjurkan. Studi ini dapat mengeksplorasi cara terbaik untuk melibatkan masyarakat setempat dalam sistem peringatan dini serta mengevaluasi respons masyarakat terhadap peringatan bencana.

Terakhir, disarankan untuk melakukan penelitian yang mengevaluasi dampak sosial-ekonomi pasca bencana dan bagaimana program mitigasi berkontribusi terhadap pemulihan masyarakat. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi masyarakat setelah bencana serta strategi pemulihan yang efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2018). *Peletakan Pondasi Pertama Pabrik Kelapa Sawit PT. Kasmar Matano Persada*.
<https://dpmptsp.luwuutarakab.go.id/berita/442/peletakan-pondasi-pertama-pabrik-kelapa-sawit-pt-kasmar-matano-persada.html>
- Ali, I., & Besse Muqita Mentari Rijal. (2022). Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *LEGAL : Journal of Law*, 1(2), 57–72.
- Antara, & Eko Ari Wibowo. (2020). *Banjir Bandang Luwu Utara: 4.930 Keluarga Terdampak, 13 Tewas*.
- Bans-Akutey, A., & Tiimub, B. M. (2021). Triangulation in Research. *Academia Letters*, September.
<https://doi.org/10.20935/al3392>
- Bartel, A. N., Lande, K. J., Roos, J., & Schloss, K. B. (2021). A Holey Perspective on Venn Diagrams. *Cognitive Science*, 46(1), e13073.
<https://doi.org/10.1111/cogs.13073>
- Darmadi, D. (2021). Komunikasi Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 48–63.

- <https://doi.org/10.15642/jik.2021.11.1.48-63>
- Efektivitas, K., Normalisasi, G., Sedimen, A., Banjir, P., Masamba, S., Luwu, K., Rusly, U., Hartono, E., Musa, R., & Ashad, H. (2022). Kajian Efektivitas Galian Normalisasi terhadap Angkutan Sedimen Pasca Banjir Sungai Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Konstruksi : Teknik, Infrastruktur Dan Sains*, 1(8), 43–54. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/kons/article/view/1159>
- Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3. <https://doi.org/10.22146/bb.50890>
- Jamin, N. H., & Risfaisal, R. (2021). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Pasca Banjir Bandang di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 32–39. <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.65>
- Raditya Jati. (2020a). *Banjir Bandang Luwu Utara, Timbunan Lumpur Hingga 4 Meter*. <https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-bandang-luwu-utara-timbunan-lumpur-hingga-4-meter>
- Raditya Jati. (2020b). *Korban Meninggal Dunia Kembali Ditemukan di Desa Radda, Luwu Utara*. <https://bnpb.go.id/berita/Korban-Meninggal-Dunia-Kembali-Ditemukan-di-Desa-Radda-Luwu-Utara>
- Desa Radda, Luwu Utara
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Ramadana, W. (2023). Tingkat Bahaya Banjir di Kawasan Sub DAS Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Plano Madani*, Volume 12(April). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani>
- Utrilla-Vázquez, M., Rodríguez-Campos, J., Avendaño-Arazate, C. H., Gschaedler, A., & Lugo-Cervantes, E. (2020). Analysis of Volatile Compounds of Five Varieties of Maya Cocoa During Fermentation and Drying Processes by Venn Diagram and PCA. *Food Research International*, 129, 108834. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108834>
- Wallerstein, N., Muhammad, M., Sanchez-Youngman, S., Rodriguez Espinosa, P., Avila, M., Baker, E. A., Barnett, S., Belone, L., Golub, M., Lucero, J., Mahdi, I., Noyes, E., Nguyen, T., Roubideaux, Y., Sigo, R., & Duran, B. (2019). Power Dynamics in Community-Based Participatory Research: A Multiple-Case Study Analysis of Partnering Contexts, Histories, and Practices. *Health Education and Behavior*, 46(1_suppl), 19S-32S. <https://doi.org/10.1177/1090198119852998>